

BAB III

PASANG SURUT PEMERINTAHAN MURSI

Dalam bab ini penulis melanjutkan bahasan bab sebelumnya yang menjelaskan mengenai sistem politik mesir pada masa rezim Husni Mubarak hingga akhirnya rezim Husni Mubarak dijatuhkan oleh sipil. Kepemimpinan Negara yang di dominasi oleh kalangan militer menimbulkan keresahan yang dialami oleh warga Mesir. Ketakutan rakyat pada kekuasaan otoriter menjadikan penguasanya bisa memimpin hingga bertahun-tahun bahkan sampai 3 dekade. Pada bab ini akan jelaskan bagaimana peristiwa awal Mursi dipilih dalam pemilu untuk pertama kalinya secara demokratis sampai akhirnya berujung kudeta.

A. Awal Mula Pemerintahan Muhammad Mursi

Muhammad Mursi Eissa al-Ayat adalah Presiden terpilih secara demokratis yang dipilih oleh mayoritas rakyat mesir. Mursi mencuat namanya terutama di kalangan Barat setelah melontarkan julukan pembunuh untuk para pemimpin Israel. Analisis menilainya sebagai ikon bagi mereka yang mencari agenda ekstrem. Bagi rakyat Mesir, terutama di kalangan pembaru, nama Mursi sangat dikenal baik. Mursi pernah melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Husni Mubarak. Akibat aksinya itu, Mursi berulang kali ditangkap dan berurusan dengan polisi dan sempat di penjara selama tujuh bulan. (Hidriyah, 2012)

Mursi adalah pemimpin Partai Kemerdekaan dan Keadilan yang merupakan sayap politik dari Ikhwanul Muslimin. Partai ini juga memenangkan pemilu parlemen dan menyabet mayoritas kursi. Namun, kalangan militer membekukannya ada 14 Juni 2012.

Dalam kampanyenya, Mursi menyerukan slogan Islam adalah Solusi. Akibat slogannya ini, kalangan Barat menduga Mursi akan menerapkan sistem teokrasi Islam fundamentalis. Namun, ketakutan Barat dibantah saat

diwawancarai oleh CNN. Mursi menyatakan hanya ingin mendapatkan cabang di pemerintahan yang mewakili keinginan murni rakyat Mesir dan ingin membela kepentingan publik. Mursi menyerukan jika tidak ada istilah demokrasi Islam, yang ada hanya demokrasi di mana rakyat adalah sumber kekuasaan. Mursi juga menyatakan akan menegakkan hak-hak perempuan dan menempatkannya sejajar dengan laki-laki. Ketika ditanya kemungkinan dia akan menerapkan perjanjian Mesir dengan Israel pada 1979, Mursi menjawab bahwa akan menghormatinya dan mengajak Israel untuk menghormatinya pula.

Mursi menang mutlak dan legal untuk jadi pemimpin Mesir 5 tahun kedepan. Ikhwanul Muslimin-meraih 47,18% suara, seperti diumumkan Komisi Pemilihan Umum Mesir, Sabtu 21 Januari. Dengan perolehan itu, FJP akan menguasai 235 kursi di Majelis Rakyat. Tempat kedua diduduki oleh kubu konservatif, Partai Salafist al Nur dengan 121 kursi atau 25% suara. Sementara partai beraliran liberal, Partai Wafd, meraih 36 kursi dan partai sekuler, Koalisi Mesir, memiliki 33 kursi. Proses pemilihan yang menjadi sejarah rakyat mesir dalam menentukan nasib negerinya sendiri pasca musim semi arab yang menumbangkan rezim Husni Mubarak 25 Januari 2012 yg telah berkuasa selama 30 tahun.

Partai-partai Islam menguasai sekitar dua pertiga parlemen. Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang dilarang di bawah pemerintahan Presiden Husni Mubarak. Kemenangan mutlak ini membuat FJP sudah memutuskan seorang politisi seniornya, Saad al- Katatni, untuk ditunjuk sebagai ketua Majelis Rakyat.

Diawal pemerintahan Mursi stabilitas politik Mesir masih tetap bergejolak. Hal ini ditandai demonstrasi yang setiap hari terjadi, bentrok antara pendukung dan penentang pemerintah, protes-protes terhadap dekrit presiden, dan pelaksanaan referendum. Pada 22 November 2012, Mursi menerbitkan dekrit tentang kekuasaan baru

buat dirinya sendiri. Namun, dia membatalkan dekrit itu pada 8 Desember setelah ada penolakan luas. Lebih dari 64% pemilih dalam referendum dua putaran mendukung konstitusi baru itu dalam sebuah pemungutan suara yang oposisi katakan telah dicurangi. Mahkamah Agung Mesir tidak mengesahkan Senat yang didominasi kaum Islamis, yang mengemban sebuah peran legislatif ketika parlemen dibubarkan, dan sebuah panel yang menyusun konstitusi. Hasil ini memicu pro dan kontra antara oposisi dan pendukung Mursi.

Ikhwanul Muslimin adalah organisasi dakwah yang berpengaruh di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang mampu membaca aspirasi masyarakat sekitarnya, sehingga platform dan gerakan dakwah yang dilakukannya tidak lepas dari masyarakat. Bahkan tidak hanya dalam wilayah dakwah, melainkan lebih luas lagi, memasuki wilayah sosial dan politik.

Dakwah Ikhwanul Muslimin dimulai dari kota Ismailiah, Mesir. Pada bulan Zulkaidah 1346 H/ Maret 1928, enam orang tokoh Ismailiah datang menemui al-Banna setelah mendengar ceramah-ceramah al-Banna yang menarik dan mendalam membicarakan pembentukan sebuah perkumpulan Islam. Keenam tokoh itu adalah: Hafidz Abdul Hamid, Ahmad al-Hushary, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-Maghribi.

Pada Awalnya tujuan Ikhwanul Muslimin adalah memberikan pengajaran agama bagi kaum muda yang diorganisasikan dalam unit-unit kecil yang disebut “keluarga”. (Watt, 2003) Setelah misi ini terpenuhi Ikhwanul Muslimin terjun ke dunia politik.

Diawal berdirinya Ikhwanul Muslimin, organisasi ini memiliki hubungan yang harmonis dengan pemerintah karena pada saat itu bertujuan untuk mengambil simpati rakyat pada masa kepemimpinan Gamal Abdul Nasser yang menggulingkan Muhammad Naguib.

Namun hubungan itu rusak saat pemerintah menandatangani persejutuan Anglo – Egyptian pada 19 Oktober 1954. Hubungan tidak baik yang semakin buruk pun memuncak ketika Ikhwanul Muslimin dituduh akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Gamal Abdul Nasser yang mengakibatkan pada tahun yang sama 1954 Ikhwanul Muslimin berdiri langsung dibubarkan. (Tahqiq, 2004).

Walaupun tidak terjun dalam dunia politik, Ikhwanul Muslimin selalu bergerak dalam membantu kegiatan sesama, pada 14 April 1948 Ikhwanul Muslimin pernah mengirim 10 ribu mujahid ke Palestina untuk bertempur melawan Israel. Bantuan pasukan tersebut membuat Israel dan sekutunya Amerika Serikat mewaspadai gerakan Ikhwanul Muslimin.

Perkembangan Ikhwan di Ismailiah sangat pesat dan sudah menembus ke beberapa kota di sekitar Ismailiah, seperti: Syubrakhit, Mahmudiyah, Abu Syuwair, Port Said, Bahr Shaghir, Suez dan Balah. Namun proses yang mereka jalani tidak selamanya mulus. Mereka menghadapi berbagai rintangan serta menanggung berbagai cobaan. Banyak sekali tulisan di berbagai media massa saat itu yang bernada memojokkan dan memfitnah aktivitas mereka. Walau demikian, semua itu tidak sedikit pun menghambat aktivitas dakwah mereka.

Ikhwanul Muslimin merupakan kelompok Islam yang tertua dan paling terorganisir di Timur Tengah bergerak mengambil peran dalam berbagai bidang politik untuk membangun Mesir pasca revolusi. Ikhwanul Muslimin telah mampu merebut kekuasaan di Mesir dengan membentuk sayap politiknya yaitu mendirikan partai Hizb Al- Hurriya Wal'Adalah (Freedom and Justice). Lewat FJP kelompok Ikhwanul Muslimin berhasil mengantarkan Muhammad Mursi sebagai Presiden yang pertama dipilih secara demokratis di Mesir pada puncak kekuasaan. Banyak Negara merasa dengan munculnya kelompok Ikhwanul Muslimin menjadi penguasa di Mesir

sebagai ancaman bagi negaranya. Salah satunya Arab Saudi. Adanya gerakan Ikhwanul Muslim akan menambah pengaruh yang kuat dalam membawa perubahan reformasi dengan corak pemerintahan demokrasi yang pada akhirnya akan menghapus rezim-rezim diktator dan kekuasaan Raja-Raja khususnya bagi Raja Abdullah Arab Saudi.

Kekhawatiran Arab Saudi munculnya Ikhwanul Muslimin di Mesir adalah bukti adanya persaingan ideologis. Arab Saudi mengambil langkah dengan memberi dukungan yang penuh kepada militer Mesir dalam mengkuadeta Presiden Muhammad Mursi dari kekuasaannya sebagai upaya untuk menjaga keamanan dari ancaman ideologi yang menjadi tujuan keamanan negaranya.

B. Mesir Pada Masa Pemerintahan Muhammad Mursi

Pada masa Pemerintahan Mursi, Mesir mengalami kondisi yang tidak kondusif karena pada Agustus 2012, Mursi mulai melakukan ‘pembersihan’ di tubuh pemerintahannya. Bahkan pada 22 November 2012 Mursi mengeluarkan dekrit yang memberikan kewenangan yang luar biasa. Mursi menyatakan bahwa semua produk parlemen (mayoritas anggota Ikhwanul Muslimin) tidak bisa dibatalkan pengadilan. Hal itu dilakukan atas dasar melindungi revolusi Mesir yang telah didapatkan. Jika prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang dianut, tentu tindakan Mursi tersebut tidak bisa dibenarkan meskipun dengan dalih apapun. Ternyata dekrit yang dibuat Mursi tersebut tidak diterima oleh kaum sekuler dan minoritas di Mesir. Menurut mereka, jika dekrit tersebut diberlakukan, tentu yang berlaku di Mesir adalah Ikhwanisasi, dan hal ini dinilai tidak sejalan dengan keberagaman di Mesir itu sendiri.

Dekrit 22 November 2012 menciptakan polarisasi antara kubu pendukung dekrit (ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiyah, Gerakan Salafi) dan kubu anti dekrit dari kelompok oposisi kelompok liberal dan sayap kiri

Front Penyelamatan Nasional (FPN). Mesir kini terpecah menjadi dua golongan atau kelompok. Kelompok yang menentang presiden Mursi adalah *Gerakan Tamarud* yang dipelopori oleh Front penyelamatan Nasional (FPN).

Kondisi Mesir makin diperparah dengan menjamurnya sikap sektarianisme yang dilakukan oleh aktivis Ikhwanul Muslimin dan aliansinya yakni Salafi, yang dibiarkan berkembang oleh Mursi. Gerakan ini bergerak melalui radio-radio dan tv setempat yang menyebarkan kebencian pada pihak di luar mereka.

Gerakan takfiri yang radikal tersebut benar-benar nyata, ketika mereka datang dan menyerbu Al-Azhar. Sebagaimana yang dilaporkan dari situs resmi al-Azhar, onazhar, bahwa pada hari selasa pagi (28/05/2013), mereka mendatangi al-Azhar dan meneriakkan cacian terhadap instansi Al-Azhar, Grand Shaikh Al-Azhar Prof. DR. Ahmad Thayeb, dan seluruh pegawai Al-Azhar. Mereka menyatakan bahwa Al-Azhar adalah instansi kafir. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana bahayanya gerakan takfiri ini, sebab instansi sekaliber al-Azhar yang terkenal moderat juga menjadi santapan takfiri mereka.

Alasan massa ingin menggulingkan Mursi karena Mursi dianggap tidak mampu memulihkan kondisi di Mesir baik dalam bidang perekonomian, keamanan Negara dan bahkan dinilai terlalu mementingkan kepentingan kelompoknya. Ketidakpuasan rakyat yang tergabung dalam barisan oposisi, sudah dimulai sejak penulisan konstitusi baru yang dinilai tidak mencerminkan kepentingan dan melindungi seluruh rakyat. Konstitusi itu juga dinilai tidak memberikan jawaban terhadap cita-cita revolusi penggulingan Husni Mubarak. Hal ini menggambarkan bahwa rakyat Mesir tidak ingin masuk dalam rezim otoriter yang baru.

Faktor ekonomi yang bergejolak pasca runtuhnya Mubarak menjadi salah satu faktor goyahnya pemerintahan mursi. Bergejolaknya ekonomi mesir juga dipengaruhi oleh kekuatan militer yang menguasai lebih

dari 30% perekonomian mesir. Revolusi kedua yang muncul merupakan imbas dari perebutan hegemoni ekonomi yang bermuara pada perampasan hak politik.

Kondisi Mesir saat ini bisa dikatakan persis seperti revolusi 2011, dimana kubu militer tidak berdiri netral. Ketika revolusi 2011, militer tidak mendukung Mubarak akan tetapi militer lebih mendukung kepada rakyat. Kini militer juga tidak berpihak kepada Mursi dan berdiri mendukung rakyat yang beroposisi. Bahkan militer melangkah lebih jauh menyingkirkan Mursi, membekukan konstitusi baru dan membentuk pemerintahan sementara.

Pada masa penggulingan Mubarak, militer membentuk Dewan Tertinggi Militer sebagai pelaksana pemerintahan sementara. tetapi kali ini militer menunjuk ketua Mahkamah Konstitusi Tertinggi Adli Mansour sebagai pemimpin sementara. Langkah ini oleh militer disebut sebagai “peta jalan” untuk kembali ke demokrasi. Peta jalan baru tersebut berisi pembekuan konstitusi, ketua mahkamah konstitusi tertinggi bertindak sebagai kepala Negara sementara dan bersumpah didepan dewan umum MK, penyelenggaraan pemilu presiden dan parlemen, membuat piagam kehormatan media yang menjamin kebebasan pers, memberi kesempatan kepada pemuda ikut dalam mengambil keputusan, membentuk pemerintahan teknokrat, dan membentuk komite yang melibatkan semua elemen masyarakat untuk mengamandemen konstitusi.

C. Ketidakpuasan Masyarakat Mesir Terhadap Muhammad Mursi

Setelah terjadinya pembentukan pemerintah baru Mesir dibawah kepemimpinan Mursi, maka telah terjadi koalisi semua elemen partai. Partai Demokratik Nasional dan partai pecahannya berhasil berkoalisi dengan Partai Kebebasan dan Keadilan dari Ikhwanul Muslimin. Selama kurang lebih satu tahun kepemimpinan Mursi berjalan dengan koalisi dari berbagai partai mulai dari idiologi sekuler, liberal dan sosialis kiri.

Selama berjalannya kepemimpinan satu tahun Mursi selalu diserang oleh kelompok koalisi sendiri mulai dari partai kiri dan tengah. Sehingga terjadi tensi politik antara oposisi dan pemerintah Mursi. Dalam politik tidak ada teman sejati dan lawan yang sejati, akan tetapi kepentingan yang abadi. Sehingga kelompok partai tengah dan kiri yang tadinya berkoalisi dengan Ikhwanul Muslimin melalui Partai Kebebasan dan Keadilan telah berujung mendukung kudeta Militer terhadap Presiden Mursi yang sah.

Dari awal kepemimpinannya, Mursi sudah dihadapkan pada gejolak politik dan aksi demonstrasi yang dilakukan rakyat. Hal ini terjadi karena rakyat menganggap bahwa Mursi tidak bisa menghentikan krisis pasca Arab Spring, dan membuat keputusan yang berlawanan dengan keinginan rakyat.

Mursi dinilai tidak mampu dalam memperbaiki kondisi Mesir pasca revolusi 2011, memulihkan perekonomian, kondisi politik, keamanan nasional, dan terlalu mementingkan kepentingan kelompoknya. (Ghafur, 2017) Mursi selalu menggaungkan slogannya “Islam adalah solusi”, Sehingga timbul kecurigaan bagi rakyat dari kalangan minoritas dan liberal, bahwa Mursi akan menerapkan konsep fundamentalis Islam di Mesir dan menjadi pemimpin yang otoriter seperti Husni Mubarak dalam gaya Islamis. Hal ini semakin didukung dengan dikeluarkannya dekrit tentang kekuasaan tak terbatas Presiden dan melihat adanya dominasi Ikhwanul Muslimin dalam pemerintahan Mesir. Sehingga revolusi 2011 lalu dianggap gagal dan tidak memberikan hasil yang sesuai dengan cita-cita rakyat .

Pada akhirnya, setelah satu tahun kepemimpinan Mursi, gejolak politik tidak juga mereda, malah semakin memburuk. Gerakan semakin membesar dan meluas. Bukan lagi hanya demonstrasi biasa, melainkan gerakan people power dengan massa rakyat dari seluruh penjuru Mesir dan dengan tuntutan suksesi kepemimpinan.

Gerakan people power ini dilakukan oleh rakyat Mesir yang berasal kelompok sekular, Liberal, Kristen koptik, Front Penyelamatan Nasional, serta rakyat biasa yang memiliki tujuan yang sama, yakni untuk melengserkan kekuasaan Mursi sebagai Presiden.

Gerakan dan strategi People Power ini oleh rakyat Mesir dijadikan sebagai solusi cepat dalam melakukan perubahan mendasar demi kestabilan di Mesir. Kekuatan rakyat dan kelompok-kelompok yang berasal dari latar belakang dan ideologi yang berbeda, turun ke jalan menyatukan suara untuk menggulingkan Mursi. Mesir kembali bergejolak, mengulang sejarah revolusi 2011 silam.

Alun-alun tahrir pun menjadi markas kelompok penentang Mursi. Panggung demokrasi ada di mana-mana. Di setiap sudut Mesir, rakyat dengan lantang menyuarakan orasi mengkritik pemerintahan Mursi. Alun-alun Tahrir sudah menjadi simbol gerakan demokrasi di Mesir. Di tempat inilah, dalam sejarah Mesir, para pemimpin disingkirkan. (Kuncahyono, 2013) Terdapat dua faktor yang menyebabkan rakyat secara bersama-sama turun melakukan aksi atau pergerakan, yaitu faktor internal dan eksternal.

Internally, most of the leaders stayed in power for so long, ranging from 20 to 40 years. In most cases, they lead their countries with an iron fist and excessive violence, leaving the people little space to participate in and making them live under pressure. [...] As a result, democratic institution does not work well, law and order is not fully upheld, there is no political freedom and no good governance. [...] Externally, the concurrent movements in the MENA were also supported by foreign players. 'Democracy' had been and will continue to be the main foreign policy agenda of western powers. The west will always be ready to pay at all the cost for a democratic change, if it not peacefully, by force. (Sujatmiko.2011. "Constellation and Change In The Middle East : Sudanese

Case” .Jurnal Luar Negeri Perubahan di Timur Tengah dan Afrika. ISSN 0215-1235. Hal.24)

Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa, faktor internal yaitu masa kepemimpinan yang lama (tidak ada batas waktu kepemimpinan), Sedangkan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari aktor luar negeri yang juga ikut berperan. Sebagaimana diketahui bahwa, demokrasi adalah agenda dari kebijakan politik luar negeri barat, sehingga barat ingin paham ini diterapkan di seluruh dunia bagaimanapun caranya.

Secara demografis, mayoritas penduduk di suatu negara merupakan kaum muda, yang dimana kaum muda inilah yang dengan semangat menyuarakan tuntutan perubahan. Kaum muda tersebut umumnya terhubung dengan jejaring sosial, yang saat ini menjadi media penyebaran informasi dan komunikasi yang bersifat real-time. (Fachir, 2011)

Dunia maya memberi ruang pada kaum muda ini untuk memberikan dukungannya dan pada akhirnya akan meningkat menjadi tuntutan untuk perubahan dalam sistem pemerintahan. Seperti diungkapkan oleh Muhammad Ashory Mulki dalam tulisannya “Gerakan Agama dan Politik di Mesir:Refleksi atas Ikhwan Al Muslimin dan Revolusi Pemuda Tahrir Square di Kairo” yakni :

The main driver behind the calls for democracy is not the older generation of Islamists, but rather youths—often well-educated youths—who lack jobs, the ability to voice discontent, and any hope for the future. They are less concerned with religion than with employment, raising a family, and leading a stable life. In the age of the Internet and social media, these youths can compare the freedoms they lack with those their counterparts enjoy elsewhere in the world. (Mulki, 2012)

Perbedaan dengan revolusi sebelumnya adalah, kali ini gejala diperparah dengan adanya pertentangan antara kubu Mursi, yakni dari ikhwanul Muslimin dari partai

keadilan dan kebebasan dan kelompok Tamarrud (pro militer). Keberpihakan militer pada kubu rakyat anti Mursi pun, semakin membuka peluang bagi lengsernya Mursi dari posisinya. Hal ini kemudian terbukti setelah pada 3 Juli 2013, militer resmi melakukan kudeta terhadap Mursi dan mengambil alih kekuasaan negara. Kudeta yang dilakukan atas dasar untuk menyelesaikan krisis politik di Mesir, malah memperparah situasi di Mesir. Gelombang protes semakin besar, terutama dari kubu Mursi, yang tidak mengakui kudeta militer yang terjadi.

Hal ini semakin membuat Mesir berada pada kekacauan yang besar. Kedua kubu, dari pihak Mursi dan Kontra (didukung oleh militer) saling serang sehingga mengakibatkan berjatuhnya korban. Militer sebagai pemegang kekuasaan sementara, juga ikut andil dalam setiap penyerangan dengan membela kelompok anti Mursi.

Mursi yang terpilih oleh suara rakyat melalui proses pemilihan umum, sebagai satu-satunya mekanisme transfer kekuasaan yang paling legitimatif, sekaligus paling menjadi terwujudnya demokrasi, nyatanya tak bisa membentung *People Power* untuk menuntut pelengserannya. Tentu saja itu merupakan penghianatan terhadap demokrasi yang selama ini digaungkan. Michael Hudson dalam bukunya "*Arab Politics The Search for Legitimacy*", yang juga dikutip oleh Siti Muti'ah Setiawati, mengamati bahwa "Negara-negara Arab, pada umumnya mengalami legitimasi politik yang akut. Tanpa legitimasi yaitu pengakuan kekuasaan dari rakyat kepada pemimpin, maka akan susah bagi pemimpin, untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat". (setiawati, 2011) Maka ketika Mursi tidak bisa mendapatkan pengakuan dari rakyatnya lagi, maka akan sulit bagi Mursi untuk meredam gejolak rakyat ini.

D. Lengsernya Presiden Muhammad Mursi

Menjelang setahun pemerintahan Presiden Muhammad Mursi, muncul isu kalau pemerintahannya belum bisa mensejahterakan rakyat Mesir dalam kurun waktu satu tahun dia memerintah. Pemerintah di bawah kepemimpinan Mursi sebenarnya bisa dikatakan jauh lebih baik dari pada pada masa Mubarak dan rezi-rezim sebelumnya, karena pada era Mursi ketakutan yang dialami rakyat Mesir selama hampir 5 dekade dipimpin oleh seorang diktator kini segala aturan yang mengecam segala kebebasan dan hak-hak manusia tidak dibatasi sepenuhnya. Mursi adalah sosok pria yang memiliki intelektual tinggi, simpatik, kharismatik, dan moderat. Namun, kepemimpinan presiden yang hafal 30 juz Al Quran ini dimana menginginkan Mesir berlandaskan syariah, dinilai sebagian kalangan akan merubah Mesir menjadi negara Islam yang mengesampingkan golongan sekuler, liberal dan minoritas. Mursi dikhawatirkan menjadi seorang theokrat yang akan menciptakan diktator baru.

Pada 30 Juni 2013, pada peringatan tahun pertama terpilihnya Morsi, ribuan protestan dari penjuru Mesir berdemonstrasi di jalan menuntut pengunduran diri presiden. Alasan dari tuntutan tersebut termasuk tuduhan bahwa sang presiden semakin otoriter dan menjalankan agama Islam tanpa mempertimpangkan kepentingan pihak oposisi sekuler. (Kingsley, 2013) Saat “Hari Kemarahan” tersebut merupakan titik akumulasi kemarahan rakyat, oposisi, antek Mubarak, dan adanya isu agama (ideologi) masuk ke dalam scenario tersebut. (Agastya, Arab Spring, 2013) Demonstrasi yang sebelumnya damai menjadi penuh kekerasan saat lima penentang Morsi terbunuh dalam bentrokan terpisah dan penembakan.

Pendukung Morsi yang ingin merebut kembali kepercayaan mereka, kebebasan, masa depan dan penilaian mereka bagi presiden terpilih pertama di Mesir Mohamad Mursi, melancarkan perlawanan kolektif belum

pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia. Mereka berdemonstrasi dan menggunakan simbol *r4bia* sebagai simbol perjuangan gerakan rakyat anti kudeta militer melangsungkan demonstrasi di kota Nasr, salah satu distrik di Kairo.

Berikut merupakan gambar berikut simbol yang diambil oleh www.r4bia.com pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Simbol R4bia
Sumber : (voa-islam.com, 2013)

Pers sangat berperan dalam membakar kemarahan rakyat. Sehari penuh berbagai media menyampai pesan kebencian terhadap Mursi. Kebebasan pers menjadi pembeda Mesir dari pemerintahan sebelumnya yang mengakibatkan keburukan yang dialami Mursi dijadikan alat sebagai momentum untuk menjatuhkan beliau.

Pada pagi hari 1 Juli 2013, penentang Morsi mendatangi ke markas Ikhwanul Muslimin di Kairo. Protestan melempari jendela dan menjarah gedung, melarikan perlengkapan kantor dan dokumen. Menteri Kesehatan dan Penduduk Mesir mengkonfirmasi kematian delapan orang pada bentrokan tersebut di Mokattam. Lalu pada tanggal tersebut, Angkatan Bersenjata Mesir menerbitkan ultimatum 48 jam, serta memberikan jangka

waktu sampai tanggal 3 Juli bagi partai untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Militer Mesir juga menyatakan akan terlibat apabila perselisihan tersebut tidak kunjung usai. Pada hari yang sama, ada sekitar 4 Menteri telah mengundurkan diri dari jabatannya, yaitu Hisham Zizou (Menteri Pariwisata), Atef helmi (Menteri Komunikasi), Hatem Bagoto (Menteri Hukum dan Parlemen), dan Khaled Abdel Aal (Menteri Lingkungan Hidup).

Pada tanggal 2 Juli, Presiden Mursi secara terbuka menyampaikan menolak ultimatum 48 jam yang diberikan oleh militer Mesir dan bersumpah akan menjalankan rekonsiliasi Nasional dan menyelesaikan krisis politik. Situasi tersebut menyebabkan krisis konstitusi dan politik berat, dengan Morsi menolak tuntutan pihak Militer, dan Angkatan Bersenjata Mesir mengancam akan mengambil alih bila politisi tidak mampu mengatasi situasi.

Pada 3 Juli, Menteri Kesehatan dan populasi mengumumkan bahwa 16 demonstran pendukung Morsi terbunuh dalam unjuk rasa di tempat lain. Pada waktu bersamaan, protes anti pemerintah juga berlangsung dan pada pukul 21.00, Abdel Fattah As-Sisi yang merupakan Kolonel Jenderal Angkatan Bersenjata Mesir mengumumkan rencana untuk program kedepan, dan pada akhirnya menyatakan berakhirnya kepemimpinan Mohammed Morsi sebagai presiden. Pada pernyataan yang sama, militer mengumumkan bahwa konstitusi ditangguhkan, pemilihan presiden akan dilangsungkan segera, dan pimpinan mahkamah konstitusi Adly Mansour diangkat menjadi kepala pemerintahan, dan pemerintah transisi akan dibentuk hingga dilangsungkannya pemilihan umum. Pihak Internasional mengecam tindakan ini, kecuali Saudi Arabia dan U.A.E., dan respons dari Amerika Serikat dan Iran. Negara lain yang mengecam adalah Suriah, walaupun Morsi sempat mengumumkan jihad melawan negara tersebut seminggu sebelum kudeta.